**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO 08 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA MERO TERKAIT KESADARAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH**

EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION NO. 08 YEAR 2015 CONCERNING WASTE
MANAGEMENT IN MERO CITY RELATED TO PUBLIC CONSCIOUSNESS IN THE
DEVELOPMENT OF SHARIA BANK SAMPAH

Ariza Umami

Universitas Muhammadiyah Metro

Email: Arizaumami86@gmail.com

Abstract. *This research is a study related to its special environmental management regarding community empowerment through the development of Islamic waste bank in Metro city. This research uses normative empris research. The normative law empris research is a combination of normative legal approach with the addition of various empirical elements. Due to this research is related to community empowerment in developing garbage bank in managing environment. Subjects in this study are regulatory regulations relating to environmental management, especially the management of Islamic waste bank in the city of Metro. Data in can in this research is secondary data in the form of study of existing rules then just conducted observation, interview and documentation. In this study the object is the Local Regulation number 08 of 2015 on Waste Management in metro. From the results of the study concluded that Regional Regulation No. 08 of 2015 on waste management in the city of Metro has provided fresh wind to the development of Islamic waste bank in Metro City which is also warmly welcomed by the Metro City Society to be aware of hygiene by changing the paradigm of society by gathering, Transport, waste. Now the paradigm is transformed into saving innovation through sharia waste bank by reusing existing waste with 3R Program (Reduce, Reuse, Recycle (3R)).*

Keywords: Management, Rubbish, Sharia

Abstrak. *Penelitian ini adalah penelitian yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup khusus nya mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan bank sampah syariah di kota Metro. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empris. Penelitian hukum normatif empris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan bank sampah dalam mengelola lingkungan. Subjek dalam penelitian ini adalah peraturan peraturan yang berkaitan dengan pegelolaan lingkungan hidup, ksusus nya pengelolaan bank sampah syariah di kota Metro. Data yang di dapat dalam penelitin ini adalah data sekunder yang berupa kajian terhadap aturan-aturan yang ada kemudian baru dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek nya adalah Peraturan Daerah nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota metro. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di kota Metro telah memberikan angin segar terhadap pengembangan bank sampah syariah di Kota Metro yang juga di sambut hangat oleh Masyarakat Kota Metro untuk sadar akan kebersihan dengan merubah paradigma masyarakat dengan kumpul, Angkut, buang. Kini paradigma itu berubah menjadi inovasi saving melalui bank sampah syariah dengan memanfaatkan kembali sampah yang ada dengan Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle (3R)).*

Kata Kunci: *Pengelolaan, Sampah, Syariah*

1. Pendahuluan

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Kekeliruan dalam pengelolaan sampah akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Sondang Siagian menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup berada pada peringkat ke-4 dalam 10 tantangan masa depan, sehingga harus mendapat perhatian serius. Pemerintah melalui UU. Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan berusaha secara serius untuk mengurai, mengantisipasi dan mengurangi persoalan sampah tersebut (Sondang P, 2003:28). Selama ini masyarakat, pada umumnya melakukan pengelolaan sampah melalui proses pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir sampah/TPAS (*end of pipe*). Padahal, setiap masyarakat memiliki volume sampah yang besar dan apabila diangkut menjadi satu akan menciptakan timbunan sampah yang besar dan berpotensi melepas gas metan (CH₄). Hal tersebut berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global.

Maka lewat UU Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012, pengelolaan sampah harus memperhatikan asas tanggungjawab, keberlanjutan, asas manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keamanan dan asas nilai ekonomi, yang pengelolaannya dengan melibatkan peranserta masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, disebutkan bahwa :“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”

Dan diperkuat dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dikatakan bahwa : *Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah*” Kedua peraturan diatas secara tegas mengatur bahwa pengelolaan sampah harus didasarkan pada kesadaran bagi pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik dan juga peranserta masyarakat sebagai bentuk nyata dari penerapan kebijakan Pemerintah mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga dibutuhkan peran aktif masyarakat agar meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kota Metro sebagai kota kedua setelah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha, dan jumlah penduduk 162.000 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Dengan jumlah penduduk tersebut maka diprediksi produksi sampahnya perhari sekitar 76.000 kg. Dapat dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan (Nawasis, 2017). Kota Metro juga dikenal sebagai Kota Pendidikan, karena memiliki ratusan jumlah sekolah dan 14 Perguruan

Tinggi, sehingga mendorong banyaknya siswa dan mahasiswa yang berasal dari luar Kota Metro, baik dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung maupun daerah dari luar Provinsi Lampung.

Hal tersebut selain memberikan dampak positif juga memberi dampak negatif bagi Kota Metro, termasuk salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh pada peningkatan volume sampah. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 0,5 Kg perharinya. Sampah-sampah yang berasal dari kawasan komersial (pasar dan pertokoan) dan permukiman di pusat-pusat kota dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) Karangrejo dengan luas 7,8 Ha yang pengolahannya masih menggunakan sistem open dump. TPA Karangrejo belakangan juga telah berusaha mengembangkan pengelolaan sampah di TPA menjadi biogas. Meski masih dalam tahap ujicoba dengan kapasitas yang terbatas hal ini tentunya perlu diapresiasi. (Maksum, 2017)

Selama ini kegiatan pengelolaan sampah di Kota Metro diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dengan tujuan mewujudkan daerah yang bersih demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, sekaligus untuk mengantisipasi jumlah gunung sampah di TPA Karangrejo Kecamatan Metro Utara. Selama ini pola hidup masyarakat masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan, serta pengelolaan sampah hanya dilakukan sebagai sesuatu yang bersifat rutin, yaitu hanya dengan cara membuang, memindahkan dan memusnahkan sampah. Pada akhirnya hal ini berdampak pada semakin banyaknya produksi sampah dan semakin menggunungnya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo.

Mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kepedulian masyarakat untuk berperanserta dan bersama-sama menyelesaikan persoalan sampah sebagai masalah bersama. Kegiatan membangun partisipasi masyarakat terkait erat dengan memberdayakan masyarakat serta mengembangkannya, karena di samping memerangi permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. (Sunyoto Usman, 2006:29)

Kesadaran beberapa kelompok masyarakat dengan mendirikan beberapa Bank Sampah di Kota Metro adalah gerakan yang harus terus menerus digiatkan dalam rangka merubah kebiasaan mayoritas masyarakat yang selama ini masih menumpuk, membakar dan membuang sampah ke saluran irigasi, karena hal tersebut bisa berdampak serius pada kesehatan, polusi, dan banjir, termasuk berdampak buruk pada nilai estetika kota.

2. Landasan Teori

Pengolaan persampahan adalah kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber atau timbulnya sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti *reduce* (pengurangan volume atau jumlahnya), *reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya). Atau Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah yang baik bukan saja untuk kepentingan kesehatan tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem penanganan sampah yang terjadi selama ini adalah :

1. Efisiensi yang rendah, karena sampah belum dipilah-pilah sehingga walaupun akan diterapkan teknologi lanjutan berupa komposting maupun daur ulang perlu tenaga untuk pemilahan menurut jenisnya sesuai dengan yang dibutuhkan, yang memerlukan dana maupun menyita waktu.
2. Pembuangan akhir ke TPA dapat menimbulkan masalah, membutuhkan lahan yang luas.
3. Menjadi lahan yang subur bagi pembiakan jenis-jenis bakteri serta bibit penyakit yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika dan keindahan lingkungan. Pergeseran pola pengelolaan persampahan perlu dilakukan seperti Pola Transformasi Waste to Source dan perlu dikembangkan sehingga sampah yang saat ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berguna akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna yang tinggi.

Jika pengelolaan sampah ini melibatkan partisipasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syari'ah diharapkan bukan hanya berdampak pada terimplementasinya Perda Kota Metro No. 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi juga bisa merubah cara pandang masyarakat terhadap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan termasuk pola bertransaksi dalam sistem perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya Bank adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat, baik menyimpan uang, meminjam uang dan jasa pelayanan lalulintas baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut kamus perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan , dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Ismaya Surjana, 2006:34)

Sedangkan sampah menurut kamus istilah lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.(Suwerda Bambang, 2012: 9)

Jadi bank sampah bisa dipahami sebagai suatu tempat penghimpun sampah baik sampah organik maupun non-organik dengan melalui suatu proses sehingga menjadi barang yang bernilai ekonomis. Menurut Bambang Suwerda, Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. .(Suwerda Bambang, 2012: 22)

Bank sampah menerima tabungan berupa sampah tetapi dapat kembali dalam bentuk uang sehingga mampu mengubah *image* sampah yang notabennya negatif menjelma menjadi barang bernilai ekonomis. Perubahan nilai dari sampah ini tidak lepas dari sistem kerja yang diterapkan Bank Sampah. Perubahan yang dilakukan Bank Sampah tidak seutuhnya karena faktor ekonomi saja, melainkan peningkatan kesadaran lingkungan terhadap masyarakat. Aspek pemberdayaan sangat kentara dalam proses

kerja Bank Sampah. Peran aktif masyarakat dalam pengkondisian lingkungan diperlukan agar tercipta keselarasan hidup.

Bank sampah dengan basis pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran besar terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan. Proses penyadaran lingkungan melalui tabungan sampah yang dikonversikan menjadi tabungan uang ini membuat berubahnya paradigma masyarakat tentang sampah. Bank Sampah Syariah pada dasarnya adalah mengadopsi nilai-nilai pada Bank Syariah yang menghindari riba, bank sampah ini tidak menggunakan sistem riba melainkan menggunakan sistem bagi hasil. (Syafi'i Antoni dan Muhammad, 2001: 90):

Sampah menurut asal zat yang dikandungnya, secara garis besar sampah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya plastic, kertas, kaca. Sampah anorganik yang terbagi menjadi sampah rumah tangga, sampah industry, dan sampah makhluk hidup. Intensitas pencemarannya sangat tinggi dan selanjutnya menimbulkan kerugian untuk masyarakat, sampah rumah tangga misalnya setiap hari kita diposisikan sebagai produsen sampah yang senantiasa memproduksi sampah terus-menerus. Sampah bermanfaat jika dimanfaatkan dengan baik dan merugikan jika dibiarkan tanpa ada pengelolaan yang baik. Dampak negative dari pengelolaan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan beberapa kerugian. Pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya

Pengelolaan yang baik salah satunya dengan cara daur ulang, daur ulang adalah penggunaan kembali material/barang yang sudah tidak terpakai untuk menjadi produk lain. Langkah-langkahnya adalah pemisahan; pisahkan barang/material yang dapat didaur ulang dengan sampah yang harus dibuang ke penimbunan sampah. Pastikan barang/material tersebut kosong dan akan lebih baik jika dalam keadaan bersih. Penyimpanan; simpanlah barang/material kering yang sudah dipisahkan tadi dimasukkan ke dalam boks/kotak tertutup tergantung jenis barangnya, misalnya boks untuk kertas bekas, botol bekas, dll. Pengiriman/penjualan, barang/material yang terkumpul dijual ke pabrik yang membutuhkan material tersebut sebagai bahan baku atau dijual jenis ini akan terus bertambah seiring dengan barang kehidupan sehari-hari yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan mengkaji data-data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir (Soejono Soekanto dan sri mamuji, 2001:14). Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Dalam penelitian ini mengambil sample salah satu Bank Sampah yang ada di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur dan Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, yakni Bank Sampah Cangkir yang pendiriannya diinisiasi sendiri oleh masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Cangkir Kamisan Kota Metro, sehingga partisipasinya lebih murni berawal dan dikembangkan oleh warga. Bank Sampah ini dikelola oleh beberapa anak muda diantaranya, Erik Pujiyanto, Lukman Hakim, Rinaldi, Arif Budi Siswanto, Abdurrahman Wahid, Elman dan Elfan, dan dibina oleh beberapa pembina dari beberapa kampus yang ada di Kota Metro. Sampai bulan Agustus 2016, sudah ada 13 unit Bank Sampah di bawah pembinaan Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro, dan sekitar 20 Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat dan sekolah, di samping adanya instalasi-instalasi pencacahan sampah plastik.

Sedangkan sampah yang terambil perhari mencapai 25% dari total sampah yang dihasilkan warga yang berjumlah sekitar 170 ton. Sampah-sampah yang dikumpulkan di bank sampah tersebut oleh masyarakat dibuat kerajinan, sebagian dipress, sebagian lagi diolah ulang menjadi biji plastik kemudian dijual ke industri. Selain menggalakkan bank sampah, Pemkot Metro juga memiliki dua unit instalasi yang mengolah sampah organik menjadi biogas dengan kapasitas 7 meter kubik. Energi listrik yang dihasilkan dari instalasi tersebut dimanfaatkan untuk 15 hingga 20 rumah.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini didasari atas keinginan yang kuat untuk melihat daerahnya bersih, rapi, dan sehat. Oleh karena itu, bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya sampai pada penanganan dan pengurangan sampah, tetapi lebih sebagai pengawas di lingkungannya untuk menjaga lingkungannya senantiasa bebas dari sampah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Metro adalah dalam bentuk memilah sampah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan di setorkan ke Bank Sampah untuk ditabung. Hal ini merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat guna membantu pengembangan Bank Sampah serta dapat mempertahankan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah. Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan daur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. pupuk hasil olahan sebagian dijual dan sebagian lagi untuk pupuk tanaman warga. Selain itu ada juga pembuatan biopori yang berfungsi untuk resapan air, hal ini berguna untuk mempercepat meresapnya air ke dalam tanah sehingga dapat terhindar dari banjir.

Partisipasi yang diberikan masyarakat berupa kewajiban melakukan pemilahan sampah rumah tangga berupa organik maupun anorganik yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri kemudian diserahkan ke Bank Sampah. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui Bank Sampah.

4. Kesimpulan

1. Pengembangan Bank Sampah di Kota Metro dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, dan Perda Kota Metro No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kekuatan hukum yang merubah cara pandang tentang pengelolaan sampah dan keberadaan bank sampah.

2. Dalam pengembangan Bank Sampah Metro Syari'ah sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat agar program pengolahan sampah dapat berjalan berdasarkan prinsip 3R. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) Melalui Bank Sampah. Partisipasi yang diberikan masyarakat berupa kewajiban melakukan pemilahan sampah rumah tangga berupa organik maupun anorganik yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.
3. Dalam pelaksanaan program Bank Sampah di Kota Metro ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan Bank Sampah adalah peran Pemerintah Daerah sebagai Pendukung pelaksanaan Program Bank Sampah serta kesadaran sebagian Masyarakat Kota Metro sudah terbentuk karena pada dasarnya kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah memberikan berbagai dampak positif berbagai aspek, seperti yang di sebutkan pada poin pertama. Sedangkan untuk faktor penghambat ada beberapa poin antara lain adalah: (a) kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah, (b) banyaknya kegiatan Bank Sampah yang membutuhkan anggaran, sehingga membutuhkan anggaran tetap setiap tahun dari berbagai pihak (pemerintah maupun swasta), (c) nilai sampah yang rendah, (d) persaingan dengan para pengumpul sampah (bos rongsokan) yang memiliki modal lebih besar.

Daftar pustaka

- Ismaya Sujana, 2006, *Kamus Perbankan*, Bandung: Pustaka Grafika.
- SOERJONO SOEKANTO, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2003, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sunyoto Usman, 2006, *Pembangunan dan Perbedayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Suwerda Bambang, 2012, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Syafi'i antonio, Muhammad, 2001, *BANK SYARI'AH DARI TEORI KE PRAKTIK*, Jakarta: Gema Insani Pres,
- Y. Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pampah
- Perda Kota Metro No. 8 Tahun 2015 Tentang *Pengelolaan Sampah*